

Polemik Salakanagara: Meninjau Kebenaran Bukti Historis Salakanagara dalam Pentas Sejarah Kuno di Indonesia

Wildhan Ichzha Maulana

wildhanichzha.2022@student.uny.ac.id

Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Yogyakarta

Abstract

This study aims to analyze historical evidence and the views of the Banten people towards the existence of the Salakanagara Hindu kingdom. The research method used is a historical method covering 4 stages, namely heuristics, verification, interpretation, and historiography which is supported by a correspondence theory framework to explore the historical truth of Salakanagara based on the support of objective facts in the form of written sources and archaeological remains. The results of this study indicate that (1) the historical facts of Salakanagara are not supported by strong primary historical sources such as findings of inscriptions, archaeological remains, literary works, and contemporary foreign chronicles. (2) The historical facts of the new Salakanagara are based on the Wangsakerta manuscript whose validity is still widely doubted, then myths and legends, in which the three incidentally are secondary historical sources. (3) The majority of Bantenese people believe that Salakanagara was once founded, but this view arises from attribution to historical sources which are less valid and relevant. Therefore, Salakanagara's studies are still limited to historical hypotheses, because they are only supported by the truth from secondary historical sources. However, it also does not rule out the possibility that stronger primary historical sources are found in its development so that the historical facts of Salakanagara can be legally recognized.

Keywords: Historical Evidence; Ancient History; Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bukti historis dan pandangan masyarakat Banten terhadap eksistensi kerajaan Hindu Salakanagara. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode sejarah mencakup 4 tahap, yakni heuristik, verifikasi, interpretasi, serta historiografi yang didukung dengan kerangka teori korespondensi guna menggali kebenaran sejarah Salakanagara berdasarkan dukungan fakta objektif berupa sumber tertulis serta peninggalan arkeologisnya. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) fakta historis Salakanagara ternyata tidak didukung dengan sumber sejarah primer yang kuat seperti temuan prasasti, tinggalan arkeologis, karya sastra, dan berita asing sezaman. (2) Fakta historis Salakanagara baru didasarkan pada naskah Wangsakerta yang validitasnya masih banyak diragukan, kemudian mitos dan legenda, di mana ketiganya notabene adalah sumber sejarah sekunder. (3) Masyarakat Banten mayoritas menyakini bahwa Salakanagara pernah berdiri, namun pandangan ini sebenarnya muncul dari pengaitan pada sumber sejarah yang notabene kurang valid dan relevan. Oleh karenanya kajian Salakanagara hingga saat ini masih terbatas hipotesa sejarah, karena hanya didukung dengan kebenaran dari sumber sejarah sekunder saja.

Namun, juga tidak menutup kemungkinan jika dalam perkembangannya ditemukan sumber sejarah primer yang lebih kuat maka fakta sejarah Salakanagara dapat diakui secara absah.

Kata Kunci: Salakanagara; Bukti Historis; Sejarah Kuno; Indonesia



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Pendahuluan

Sejarah adalah kajian yang dikembangkan dan dilestarikan oleh mayoritas masyarakat di seluruh belahan dunia. Sejarah sebenarnya merupakan cakupan informasi mengenai peristiwa atau kejadian dari umat manusia di masa lampau yang dipaparkan dengan baik (Korom, 2015; Nordholt et al., 2008; Nurmiainen, 2006; Pranoto, 2010; Saimima, 2014). Namun, dalam perkembangannya yang seringkali menjadi problem adalah ketika kajian, interpretasi, maupun penulisan sejarah sejak dahulu hingga saat ini justru tidak bisa lepas dari unsur kontroversi, mengapa?, Karena aktivitas yang berhubungan dengan aspek kesejarahan tidak hanya berkuat pada ranah akademis semata, melainkan juga berkaitan dengan kepentingan tertentu (Purwanto, 2009). Adapun kepentingan yang dimaksud tersebut salah satunya, yakni menggunakan sejarah sebagai alat indoktrinasi. Dalam hal ini misalnya mengenai penulisan sejarah G-30-S/PKI (Gestapu) pada masa rezim Orde Baru, di mana interpretasi dan penuturan sejarah yang benar serta diakui secara nasional adalah berasal dari pemerintah ataupun pihak yang pro terhadap Orde Baru. Sedangkan, interpretasi dan penuturan sejarah dari pihak yang kontra dengan pemerintah sekalipun mungkin benar, namun tidak akan diakui bahkan dianggap melawan pemerintah, hal ini menunjukkan bahwa sejarah memang digunakan untuk kepentingan indoktrinasi pemahaman sejarah G-30-S/PKI. Selain itu kontroversi dalam sejarah juga ditandai dengan adanya klaim mengenai asal-usul, kedautalan wilayah, legitimasi pemegang kekuasaan, penetapan status kepahlawanan, siapa pihak musuh dan korban, peranan dan nasib pihak pengkhianat, bahkan siapa kaum elit dan yang terpinggirkan sejak lama menjadi bagian integral dari perdebatan sejarah yang melibatkan pelaku sejarahnya sendiri ataupun masyarakat pada era setelahnya .

Pada dasarnya kontroversi sejarah merujuk pada penulisan, interpretasi, dan penuturan fakta-fakta sejarah yang menimbulkan pertentangan ataupun perdebatan bagi seluruh kalangan (Ahmad, 2007, 2016; Dascal & Chang, 2007). Apabila berbicara mengenai kontroversi sejarah maka terbagi menjadi 2, yakni (1) kontroversi seputar fakta sejarah; serta (2) kontroversi seputar signifikansi, relevansi, hingga interpretasi kumpulan fakta sejarah (Abbas, 2016; Hartono & Huda, 2020; Kochhar, 2008). Kontroversi jenis pertama mengenai fakta-fakta sejarah terjadi, sebab minimnya temuan bukti sejarah bahkan bukti yang tersedia juga dinilai janggal atau tidak relevan. Untuk kontroversi jenis kedua mengenai signifikansi, relevansi, serta interpretasi kumpulan fakta sejarah terjadi,

Wildhan Ichzha Maulana
Polemik Salakanagara: Meninjau Kebenaran Bukti Historis Salakanagara
dalam Pentas Sejarah Kuno di Indonesia

karena faktor pendekatan yang digunakan seringkali tidak ilmiah, terdapat bias serta pengaruh kuat dari prasangka, maupun terbatasnya akses sejarawan untuk melakukan interpretasi peristiwa sejarah sehingga berujung timbulnya sebuah kontroversi. Selain itu sejarah kontroversi dalam ulasan lain juga terbagi menjadi 2, yakni (1) sejarah kontroversi politis yang mencakup penggunaan sejarah oleh pemerintah sebagai alat indoktrinasi untuk mempertahankan kekuasaannya; serta (2) sejarah kontroversi keilmuan yang mencakup ketidakmampuan untuk melakukan konstruksi dan rekonstruksi masa lampau secara metodologis dan historiografis (Purwanto, 2009; Septianingsih et al., 2014). Mengenai contoh dari sejarah kontroversi keilmuan salah satunya dapat merujuk pada karya alternatif G-30-S/PKI. Dalam konteks ini penulis sejarah alternatif G-30-S/PKI sebagian diantaranya mencakup kalangan aktivis yang anti Orde Baru, sehingga mereka berupaya melawan hegemoni sejarah yang ada dengan menyajikan fakta-fakta sejarah yang digali langsung dari orang-orang tertuduh komunis. Akan tetapi, menurut Bambang Purwanto yang menjadi catatan pada sejumlah karya tulis sejarah justru lebih menekankan sisi historiografi empati ketimbang historiografi kritis, hal ini tentu menjadi indikasi bahwa penulis yang notabene dari kalangan aktivis tidak mampu membedakan antara persepsi sejarah yang terkontaminasi oleh pengalaman tragis pasca G-30-S/PKI dengan realitas sejarah yang terjadi sebelumnya (Purwanto, 2004; Firza, 2017).

Lebih lanjut jika ulasan sebelumnya dikaitkan dengan peristiwa sejarah di Indonesia, maka dapat kita temukan beberapa peristiwa sejarah yang diklaim kontroversial seperti (1) kontroversi Salakanagara sebagai kerajaan Hindu paling awal di Nusantara yang usianya lebih tua dari Kutai kuno serta Tarumanegara (Nina H. Lubis, 2002; Munandar, 2012). (2) Kontroversi penyebaran agama Islam ke wilayah Nusantara (Azra, 2002, 2013; Ricklefs, 2008). (3) Kontroversi tokoh-Walisongo (Aizid, 2014; Ali, 2007; Ashadi, 2017; W. I. Maulana, 2022; Sunyoto, 2011, 2017). (4) Kontroversi pembangunan proyek jalan raya pos Anyer hingga Panarukan (Hartatik, 2016; Marihandono, 2008; Toer, 2005). (5) Kontroversi surat-surat R.A. Kartini (Barikli, 2012; N. Said, 2014). (6) Kontroversi penetapan 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional (Aizid, 2014; Husda, 2019). (7) Kontroversi Serangan Umum 1 Maret 1949 (Aizid, 2014; Hutagalung, 2010). Kontroversi peristiwa G-30-S/PKI (Gestapu) (Aizid, 2014; Dake, 2006; S. H. Said, 2018). (8) Kontroversi orisinalitas Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) (Djarot, 2007; Pambudi, 2006; Tim Lembaga Analisis Informasi (LAI), 2007). (9) Kontroversi referendum dari Timor Timur (Conceicao Do, 2014; Fajar, 2017; Mahendra et al., 2022; Tobing, 2014). (10) Kontroversi peristiwa reformasi dan jatuhnya Soeharto pada tahun 1998 (Aizid, 2014; Suparno, 2012).

Dari sejumlah peristiwa sejarah di atas yang diklaim kontroversial, maka salah satu yang menarik untuk diulas lebih dalam adalah kontroversi seputar eksistensi Salakanagara sebagai kerajaan Hindu tertua di Nusantara. Namun, sebenarnya sejak kapan kerajaan Salakanagara ini mulai menjadi diskursus topik sejarah yang banyak diperdebatkan oleh kalangan ahli?. Sebelumnya para ahli sejarah, arkeolog, serta epigraf

Indonesia belum mengenal Salakanagara sebagai kerajaan yang fakta historisnya terakui secara absah. Perbincangan mengenai kerajaan Salakanagara di mulai sejak tahun 1988 setelah ditemukannya naskah Wangsakerta pada tahun 1970-an. Dalam hal ini ahli epigrafi, Boechari adalah tokoh awal yang melakukan kajian terhadap naskah Wangsakerta sebagai satu-satunya sumber sekunder kerajaan Salakanagara. Adapun hasil kajian Boechari tahun 1988 menjelaskan bahwa dalam naskah Wangsakerta terdapat kejanggalan seperti (1) umur naskah yang tidak sesuai ditinjau dengan tahun penulisannya, di mana naskah Wangsakerta ini ditulis pada ke-abad 17 dengan meniru aksara Jawa kuno, namun tidak sempurna dan kertas yang digunakan sebenarnya jenis manila yang dicelup. (2) Isi naskah yang terlalu lengkap salah satunya ditandai dengan pembagian wilayah administratif meliputi Jawa Kulwan (Jawa Barat), Jawa Madya (Jawa Tengah), serta Jawa Wetan (Jawa Timur), padahal pembagian ini baru dikenal dalam buku sejarah modern. (3) Naskah Wangsakerta memiliki corak yang identik dengan pemikiran sejarah para sarjana Belanda. (4) Eksistensi panitia Wangsakerta selaku penulis naskah dinilai janggal, karena pada masa sezamannya tidak ditemukan catatan lokal atau asing yang mendukung adanya panitia itu dan *gotrasawala* (perkumpulan besar) yang diadakan (Boechari, 1988). Upaya Boechari ini, kemudian juga menjadi pendorong bagi ahli lainnya untuk membuktikan kebenaran sejarah kerajaan Salakanagara dari aspek arkelogis, namun dalam perkembangannya hingga saat ini juga tidak ditemukan bukti yang memadai seperti adanya prasasti, tinggalan arkeologis, karya sastra, serta catatan asing yang sezaman. Oleh karenanya, para ahli berdasarkan ketersediaan bukti-bukti sejarah yang ada dan sudah teruji validitasnya tetap memposisikan kerajaan Kutai kuno di Kalimantan Timur serta Tarumanegara di Jawa Barat masing-masing sebagai kerajaan Hindu paling tua di Nusantara.

Sebelumnya terdapat beberapa penelitian yang mengulas kebenaran sejarah dari kerajaan Salakanagara, seperti penelitian yang dilakukan (1) Agus Aris Munandar (2012) dengan judul "*Kerajaan Salakanagara Berdasarkan Data yang Tersedia*" yang mengulas ketersediaan sumber-sumber sejarah primer ataupun sekunder yang menjelaskan eksistensi kerajaan Salakanagara. (2) Nina Herlina Lubis (2002) dengan judul "*Kontroversi Tentang Naskah Wangsakerta*" yang mengulas validitas serta kelayakan naskah Wangsakerta sebagai sumber sejarah kerajaan Salakanagara. (3) Kayato Hardani (2010) dengan judul "*Rajya Rajya Ing Jawa Madhya, Raja-Raja Mataram Kuna Abad 9-10 Masehi: Perbandingan Antara Naskah Pustaka Rajya-Rajya I Bhumi Nusantara dengan Prasasti Wanua Tengah III*" yang mengulas perbandingan antara muatan data sejarah dalam kitab "*Pustaka Rajya-Rajya I Bhumi Nusantara*" (salah satu jilid naskah Wangsakerta) dengan prasasti Wanua Tengah III. Berdasarkan contoh penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti mencoba untuk mencari celah dengan menganalisis bukti historis-arkelogis maupun pandangan masyarakat Banten terhadap eksistensi kerajaan Salakanagara dengan mengacu pada kerangka teori korespondensi untuk mencari tahu adanya kesesuaian antara kebenaran klaim sejarah

Wildhan Ichzha Maulana
Polemik Salakanagara: Meninjau Kebenaran Bukti Historis Salakanagara
dalam Pentas Sejarah Kuno di Indonesia

dengan fakta-fakta objektif yang ada. Adapun manfaat dari penelitian ini secara teoritis memperkaya perspektif kesejarahan serta meluruskan klaim sejarah yang selama ini masih belum didasarkan pada bukti-bukti yang valid. Secara praktis dapat dijadikan sebagai rujukan untuk mengembangkan kajian penelitian pada bidang yang serupa.

Metode Penelitian

Mengacu pada paparan pendahuluan di atas maka kajian penelitian ini model penelitian sejarah. Menurut Louis Gottschalk, metode penelitian sejarah adalah mekanisme pengujian dan analisis sejarah untuk menemukan data yang autentik, sehingga dapat menyajikan keterangan sejarah yang teruji validitasnya (Abdurrahman, 2011; Gottschalk, 2008; Sulasman, 2014). Selain itu dalam kajian juga didukung dengan kerangka teori korespondensi yang menekankan adanya keterkaitan antara bukti konkrit bagi suatu kebenaran pengetahuan (David, 2018; Indarti, 2020; O'Connor, 2021). Adapun dalam kajian sejarah teori korespondensi ini berupaya menggali korelasi antara kebenaran sejarah yang dihasilkan dengan adanya pembuktian fakta yang dapat mendukung suatu proposisi atau hipotesis sejarah tersebut. Lebih lanjut kajian penelitian ini terbagi pada 4 tahapan yang meliputi heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi (Kartodirdjo, 2017; Kuntowijoyo, 2013; Sulasman, 2014; Wasino & Hartatik, 2018) sebagai berikut:

1. Heuristik, di mana pada tahapan ini peneliti berupaya mengumpulkan data sumber sejarah meliputi catatan tertulis "*Pustaka Rajya-Rajya I Bhumi Nusantara*"/PRRBN (bagian jilid naskah Wangsakerta) dan bukti tinggalan arkeologis yang selama ini dikaitkan-kaitkan dengan eksistensi kerajaan Salakanagara.
2. Verifikasi, di mana pada tahapan ini peneliti melakukan verifikasi secara internal apakah sumber sejarah kerajaan Salakanagara yang ada dapat dipercaya. Selain itu peneliti melakukan verifikasi secara eksternal untuk membuktikan keaslian dari sumber sejarah kerajaan Salakanagara serta mengidentifikasi apakah sumber tertulis (sumber sekunder) yang dipakai termasuk hasil salinan dari sumber aslinya.
3. Interpretasi, di mana pada tahapan ini peneliti melakukan penafsiran data sejarah yang diperoleh dari sumber yang telah diverifikasi sebelumnya.
4. Historiografi, di mana pada tahapan ini peneliti melakukan penulisan fakta sejarah dilengkapi dengan uraian objektif dari topik permasalahan yang diusung.

Hasil dan Pembahasan Penelitian

Adapun pada sub pembahasan ini akan diulas mengenai 3 poin, yakni (1) meninjau ketersediaan sumber sejarah kerajaan Salakanagara. (2) Kritik terhadap naskah Wangsakerta sebagai sumber sekunder sejarah kerajaan Salakanagara. (3) Pandangan masyarakat Banten atas eksistensi kerajaan Salakanagara.

1. Meninjau Ketersediaan Sumber Sejarah Kerajaan Salakanagara

Pada dasarnya untuk menghasilkan klaim sejarah yang benar perlu didukung dengan ketersediaan sumber sejarah memadai, di mana hal ini juga berlaku terhadap klaim sejarah dari kerajaan Salakanagara. Terkait ketersediaan sumber sejarah tersebut sebenarnya juga perlu diklasifikasi berdasarkan 7 tingkatan antara lain (1) prasasti sezaman, yakni meliputi prasasti-prasasti yang dikeluarkan pada masa tertentu, sehingga dapat digunakan sebagai sumber untuk menyusun historiografi masa tersebut. (2) Peninggalan arkeologis, yakni mencakup peninggalan beragam benda arkeologis yang berasal dari masa yang sama dengan terjadinya suatu peristiwa sejarah yang sedang disusun historiografinya. (3) Karya sastra sezaman, yakni mencakup sumber tertulis selain prasasti berupa karya-karya sastra, dalam hal ini dikatakan sezaman jika tidak ada perubahan isi ketika ditafsirkan serta tidak mengalami penyalinan ulang. (4) Berita asing sezaman, yakni mencakup catatan atau jurnal dari orang asing yang pernah berkunjung ke Nusantara pada saat terjadinya suatu peristiwa sejarah. (5) Sumber sastra dari masa kemudian, yakni mencakup sumber tertulis berupa karya sastra yang dihasilkan dari masa setelah terjadinya suatu peristiwa sejarah. (6) Mitos atau legenda, yakni meliputi tradisi lisan yang berkembang pada suatu masyarakat untuk menjelaskan fenomena sejarah serta budaya yang terjadi. Namun, yang perlu dipahami bahwa kandungan fakta sejarah dalam mitos atau legenda cukup lemah, karena sifatnya imajinatif dan senantiasa berkaitan dengan hal-hal supranatural, meski demikian masih ada beberapa mitos atau legenda yang kandungan fakta sejarahnya dapat diuji dengan pendekatan ilmiah. (7) Interpretasi ahli adalah penafsiran yang didasarkan pada sintesa dari berbagai sumber sejarah (Munandar, 2012).

Ketika melakukan kajian sejarah ketujuh tingkatan sumber tersebut harus diperhatikan, di mana prasasti merupakan sumber sejarah yang mempunyai kedudukan paling kuat disusul dengan temuan arkeologis, karya sastra, serta berita asing sezaman sebagai kategori sumber sejarah primer. Sedangkan karya sastra dari masa kemudian, mitos atau legenda, serta interpretasi ahli sebagai kategori sumber sejarah sekunder. Adapun kaitannya dengan upaya pembuktian klaim sejarah, khususnya pada era peradaban Hindu-Buddha di Nusantara, maka setidaknya 4 tingkatan teratas dari sumber sejarah atau sumber primer harus terpenuhi. Dalam hal ini misalnya kita dapat mengambil contoh pembuktian klaim sejarah kerajaan Kutai kuno di Kalimantan Timur serta Tarumanegara di Jawa Barat. Keduanya merupakan kerajaan Hindu tertua di Nusantara yang sejarahnya dapat diakui secara absah, karena eksistensinya didukung dengan sumber primer yang mencakup prasasti, temuan arkeologis, serta berita asing sezaman. Meskipun, kebenaran sejarah kedua kerajaan Hindu tersebut benar-benar absah, namun nyatanya sejak dekade 1980-an hingga saat ini masih marak upaya untuk meruntuhkan klaim sejarah tersebut. Salah satunya dengan

Wildhan Ichzha Maulana
Polemik Salakanagara: Meninjau Kebenaran Bukti Historis Salakanagara
dalam Pentas Sejarah Kuno di Indonesia

menjadikan kerajaan Salakanagara di Jawa Barat yang konon berdiri 200 tahun lebih awal sebagai kandidat baru kerajaan Hindu tertua di Nusantara menggusur Kutai kuno serta Tarumanegara. Namun, yang menjadi pertanyaan besar apakah eksistensi dari kerajaan Salakanagara juga didukung dengan sumber sejarah primer yang kuat sebagaimana Kutai kuno serta Tarumanegara?. Berikut ini perbandingan sumber sejarah primer antara kerajaan Salakanagara, Kutai kuno, serta Tarumanegara.

No	Sumber Sejarah	Salakanagara	Kutai Kuno	Tarumanegara
1.	Bukti Prasasti	X	√	√
2.	Bukti Tinggalan Arkeologis	X	√	√
3.	Bukti Karya Sastra Sezaman	X	X	X
4.	Bukti Berita Asing Sezaman	X	X	√

Tabel 1. Perbandingan Sumber Sejarah Primer Kerajaan Salakanagara, Kutai Kuno, dan Tarumanegara

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui eksistensi dari kerajaan Salakanagara tidak didukung dengan ketersediaan sumber primer yang memadai, sehingga klaim sejarah yang disematkan juga masih meragukan apabila dibandingkan dengan kerajaan Kutai kuno serta Tarumanegara yang memiliki sumber primer lebih lengkap. Adapun kerajaan Kutai kuno memiliki 2 sumber primer meliputi (1) prasasti Yupa; serta (2) temuan arkeologis arca Siwa dan Nandiswara di Gunung Kombeng. (Cahyono & Gunadi, 2007; Tim Peneliti, 2021; Tim Penulisan Sejarah Indonesia, 2010). Selain itu kerajaan Kutai kuno memiliki juga memiliki 2 sumber sekunder, yakni (1) karya sastra kemudian berupa kitab Salasilah Kutai (Adham, 1981; Sarip, 2020; Syamsuri, 2021); serta (2) legenda cerita rakyat Aji Batara Agung Dewa Sakti dan Putri Melenu (Herawati, 2019; Sari et al., 2017). Berikutnya kerajaan Tarumanegara mempunyai 3 sumber primer, yakni (1) ketujuh prasasti (Ciaruteun, Kebonkopi, Pasir Koleangkak, Pasir Awi, Muara Cianten, Tugu, serta Cidanghiang); (2) temuan arkeologis seperti arca (Rajarsi dan Wisnu Cibuaya I-II), tablet dari tanah liat dengan relief Buddha, dan kompleks candi Batujaya (Tim Penulisan Sejarah Indonesia, 2010); serta (3) berita asing sezaman dari Cina berupa catatan perjalanan Fa Hien (414 M) dan catatan dari Dinasti Soui (528 dan 538 M) terkait kedatangan seorang utusan dari *To-lo-mo* (Tarumanegara) (Groeneveldt,

2018; Tim Penulisan Sejarah Indonesia, 2010; Widyastuti, 2013). Selain itu kerajaan Tarumanegara juga memiliki sumber sekunder, yakni legenda Kampung Muara (Rahmawati & Andika, 2021).

Lebih lanjut bagaimana dengan kerajaan Salakanagara? sebenarnya eksistensi kerajaan Salakanagara selama ini baru didasarkan pada sumber sekunder berupa karya sastra masa kemudian, yakni naskah Wangsakerta bagian "*Pustaka Rajya-Rajya I Bhumi Nusantara*" yang ditemukan sekitar tahun 1970-an. Adapun gambaran umum "*Pustaka Rajya-Rajya I Bhumi Nusantara*" tentang kerajaan Salakanagara, yakni (1) menjelaskan seputar kedatangan Sang Dewawarman ke *Yawadwipa* yang kemudian menikahi Pwahaci Larasati putri dari Aki Tirem (penguasa lokal); (2) menjelaskan pendirian Salakanagara tahun 132 M dan wilayah kekuasaannya; (3) serta menjelaskan 7 penguasa Salakanagara berikutnya beserta hubungannya dengan kerajaan Kutai kuno dan Tarumanegara. Namun, seiring dengan berjalannya waktu terdapat sumber-sumber lain yang digunakan untuk mendukung naskah Wangsakerta dalam rangka melegitimasi sejarah Salakanagara meliputi temuan arkeologis seperti situs Cihunjuran, situs Lebak Kosala, situs Lebak Cibeduk, serta patung arca Ganesha di daerah Pandeglang. Selain itu terdapat buku asing "*Geographike Hyphegesis*" karya Cladius Ptolomeus yang menyebutkan *chryse chora* (kota emas), *argyre chora* (kota perak), kemudian *labadiou* (pulau Jelai). Perlu diketahui bahwa penamaan *argyre chora* dalam buku "*Geographike Hyphegesis*" sebenarnya merujuk pada kota yang terletak di ujung Barat *labadiou* (Ayatrohaedi, 1997). Dalam hal ini memang terdapat asosiasi kata *argyre* dalam bahasa Yunani dengan *salaka* dalam bahasa Sanskerta yang artinya perak, serta kata *labadiou* juga diasosiasikan dengan kata *Yawadwipa*. Terakhir terdapat catatan Dinasti Han (132 M) yang menyebutkan raja Ye-Tiao bernama Pien meminjamkan materai emas dan pita ungu kepada raja Tiao-Pien, di mana Ye-Tiao diasosiasikan dengan *Yawadwipa* serta Tiao-Pien dengan nama Dewawarman dalam bahasa Sanskerta (Ali et al., 2018; Ekadjati, 2004). Berikutnya pada sub pembahasan ini akan diulas mengenai kesesuaian sumber sejarah yang dipakai untuk memperkuat klaim sejarah kerajaan Salakanagara dalam naskah Wangsakerta sebagai berikut:

a. Situs Cihunjuran, Lebak Kosala, dan Lebak Cibedug

Di lokasi 3 situs ini banyak ditemukan tinggalan arkeologis dalam bentuk menhir, dolmen, sarkofagus, fragmen pipisan, dan punden berundak. Adapun di situs Cihunjuran yang juga dikenal sebagai objek wisata ditemukan beberapa peninggalan dari masa megalitik

Wildhan Ichzha Maulana
Polemik Salakanagara: Meninjau Kebenaran Bukti Historis Salakanagara
dalam Pentas Sejarah Kuno di Indonesia

seperti menhir serta lumpang batu. Berikutnya situs Lebak Kosala sebenarnya merupakan bangunan punden berundak yang terdiri dari 5 teras undakan, di mana masing-masing terasnya ditemukan tinggalan megalitik seperti punden batu, tatanan batu, pelinggih batu, batu peluru, batu tegak, serta struktur batu berbentuk denah persegi (Fadhlan & Intan, 2002). Sedangkan Lebak Cibedug adalah kawasan situs yang banyak ditemukan menhir, batu bergores, serta punden berundak, khusus punden berundak di situs ini terdiri dari 3 teras yang membentuk sebuah piramid (Lubis et al., 2014). Perlu diketahui bahwa berbagai tinggalan arkeologis di ketiga situs tersebut kental dengan corak budaya megalitik dari masyarakat Austronesia (Kusuma & Damai, 2019; Prasetyo, 2006).



Gambar 1. Situs Lebak Cibedug dan Situs Lebak Kosala
(Sumber: <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/>)

Oleh karenanya jika tinggalan arkeologis ini merupakan suatu fakta objektif yang digunakan untuk mendukung hipotesis atau klaim sejarah kerajaan Salakanagara seperti yang termuat dalam naskah Wangsakerta "*Pustaka Rajya-Rajya I Bhumi Nusantara*" agaknya tidaklah relevan. Hal ini karena dalam "*Pustaka Rajya-Rajya I Bhumi Nusantara*" telah dijelaskan bahwa Dewawarman berasal dari India serta merupakan penganut Hindu yang menjadi menantu tokoh lokal Banten (Aki Tirem), sepeninggal Aki Tirem dia mendirikan pemerintahan baru bercorak Hindu yang bernama Salakanagara (Ayatrohaedi & Atja, 1991). Adapun pengaruh kebudayaan Hindu yang di bawa Dewawarman sangat berbeda dengan kebudayaan asli masyarakat Nusantara. Meskipun, seiring perkembangannya kebudayaan Hindu mengalami akulturasi dengan kebudayaan asli Nusantara (megalitik), salah satunya dengan mengadopsi konsep

perundakan pada arsitektur candi Hindu (A. N. S. Muhammad & Pamungkas, 2016; Pradipta & Herwindo, 2017; Titasari, 2017). Akan tetapi, faktanya eksistensi kerajaan Salakanagara sama sekali tidak mewariskan tinggalan arkeologis berupa candi. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa ada rentang waktu cukup jauh antara keterangan Salakanagara di dalam "*Pustaka Rajya-Rajya I Bhumi Nusantara*" dengan temuan arkeologis yang ada, sehingga naskah Wangsakerta sebagai karya sastra kemudian (sumber sekunder) memang tidak didukung dengan bukti arkeologis (sumber primer) yang memadai.

b. Patung Arca Ganesha

Selain ketiga situs di atas pada tahun 2020 lalu ditemukan tinggalan arkeologis berupa arca Ganesha di Kabupaten Pandeglang, Banten yang diduga berasal dari masa Salakanagara sekitar abad ke-1 M. Pada dasarnya Ganesha adalah dewa yang paling populer setelah Brahma, Wisnu, dan Siwa yang juga bercorak trimurti, karena arca Ganesha sering ditemukan berasosiasi dengan tinggalan arkeologis Siwa mencakup arca Siwa, lingga-yoni, arca Dewi Durga, hingga arca Resi Agastya (Murdihastomo, 2020). Selain itu corak trimurti pada arca Ganesha juga diperkuat dengan adanya ornamen berupa upawita ular, mata tiga, serta candrakapala di mahkota, di mana ketiganya merupakan ornamen yang juga dimiliki oleh dewa Siwa (R. Maulana, 1997; Murdihastomo, 2020; Sedyawati, 1994). Namun, yang menyebabkan kejanggalan, yakni kebudayaan Hindu trimurti sendiri sebenarnya baru berkembang di Nusantara pada abad ke-8 hingga 10 M ditandai dengan lahirnya peradaban Mataram kuno di bawah kepemimpinan Raja Sanjaya (Arrazaq & Rochmat, 2020; Tim Penulisan Sejarah Indonesia, 2010). Perlu diketahui raja-raja Mataram kuno dari Dinasti Sanjaya dan masyarakatnya menganut Hindu Siwa (bagian dari Trimurti) seperti yang tergambar dalam isi bait prasasti Canggal tahun 732 M yang banyak memuliakan dewa Siwa (Poerbatjaraka, 1957). Adapun pengaruh kebudayaan Hindu trimurti di Mataram kuno pada abad ke-8 hingga 10 M juga diperkuat dengan temuan prasasti stambha lingga serta stambha bauddha di Jawa Tengah yang kental dengan unsur Syiwaistik dan trimurti (Alnoza & Munandar, 2021; Munandar, 2019). Selain itu candi-candi peninggalan Mataram Hindu yang masih eksis sampai hari ini meliputi candi Prambanan, Gedong Songo, dan Dieng juga lekat dengan ikonografi Syiwaistik. Oleh karenanya apabila arca

Wildhan Ichzha Maulana
Polemik Salakanagara: Meninjau Kebenaran Bukti Historis Salakanagara
dalam Pentas Sejarah Kuno di Indonesia

Ganesha adalah fakta objektif yang digunakan untuk mendukung klaim sejarah kerajaan Salakanagara dalam "*Pustaka Rajya-Rajya I Bhumi Nusantara*" agaknya tidak relevan, karena terdapat rentang waktu yang cukup jauh antara Salakanagara dengan temuan arca tersebut sebagai sumber primer pendukung.

c. Buku "*Geographike Hyphegesis*"

Selain sejumlah tinggalan arkeologis di atas juga terdapat sumber asing yang dikaitkan dengan kerajaan Salakanegara, yakni buku "*Geographike Hyphegesis*" karya Claudius Ptolomeus yang ditulis pada tahun 150 M menyebutkan istilah *argyre chora* (kota perak), *chryse chora* (kota emas), serta *labadiou* (pulau Jelai) (Tim Penulisan Sejarah Indonesia, 2010). Pada sejumlah literatur kata *labadiou* juga diasosiasikan dengan kata *Yawadwipa* dalam bahasa Sanskerta yang berarti pulau Jelai atau Jawa. Pada dasarnya *labadiou* tidak hanya digunakan untuk menyebut pulau Jawa saja, melainkan juga untuk menyebut pulau Sumatera maupun Kalimantan Barat Daya (Krom, 1931; A. M. Muhammad, 2017). Adapun dalam pendapat lainnya *labadiou* juga menjadi sebutan bagi kesatuan pulau Jawa, Sumatera, dan Malaka (Boedihartono et al., 2007). Sedangkan, kata Jawa baru muncul pada prasasti Canggal tahun 732 M yang usianya jauh lebih muda dari buku "*Geographike Hyphegesis*", sehingga apabila *labadiou* diasosiasikan dengan *Yawadwipa* sebenarnya masih spekulatif. Selain itu kekurangan "*Geographike Hyphegesis*" juga tidak menjelaskan secara spesifik, di mana letak atau ciri-ciri *argyre chora* (kota perak), *chryse chora* (kota emas), serta *labadiou* (pulau Jelai). Oleh karenanya klaim yang memaksa guna membenarkan "*Geographike Hyphegesis*" sebagai sumber asing pendukung tentu akan mencari celah dengan mengasosiasikan *argyre chora* sebagai Salakanegara, dikarenakan adanya kesamaan makna kata sebagai kota atau negeri perak.

d. Catatan Dari Dinasti Han (132 M)

Berikutnya masih ada sumber asing lainnya yang dikaitkan dengan kerajaan Salakanegara, yakni catatan dari Dinasti Han (132 M) yang menyebut raja Ye-Tiao bernama Pien meminjamkan materai emas serta pita ungu kepada raja Tiao-Pien, di mana terjalinnya relasi ini tidak terlepas dari aspek perdagangan. Dalam catatan ini kata Ye-Tiao telah diasosiasikan dengan *Yawadwipa* serta Tiao-Pien dengan Dewawarman dalam bahasa Sanskerta (Ali et al., 2018; Ekadjati, 2004; Krom, 1931). Namun, jika mengacu pada kajian Groeneveldt pra abad ke-5 M Cina memang telah melakukan interaksi dagang

dengan masyarakat Asia Tenggara, tetapi belum mencapai wilayah Nusantara (Sumatera-Jawa) (Groeneveldt, 2018). Sedangkan dalam pendapat lainnya menurut Wang Gungwu, pada masa Dinasti Han sudah ada rute perdagangan menuju Asia Tenggara dari Nanhai (laut Cina Selatan) menuju Shan (Birma) serta Ye-Tiao (Sumatera-Jawa) (Gungwu, 2007), di mana komoditas utama dan tertua yang diperdagangkan oleh mereka adalah keramik (Guy, 2001; Maziyah, 2016; Vainker, 1991). Namun, hal penting yang harus diperhatikan adalah temuan artefak keramik sebagai komoditi dagang mewah dari masa Dinasti Han di Jawa khususnya sangat sedikit dan tidak terpusat, sehingga tidak mampu memberi keterangan yang jelas apabila sebelumnya memang pernah ada interaksi dagang antara kerajaan lokal Nusantara dengan Dinasti Han pada masa itu. Lebih lanjut jika dibandingkan dengan masa dinasti selanjutnya seperti Tang, Song, Yuan, dan Ming, maka temuan artefak keramik di Jawa lebih banyak, terpusat pada daerah basis kekuasaan kerajaan, serta sezaman dengan masa berdirinya kerajaan (Maziyah, 2016). Dalam hal ini misalnya temuan artefak keramik Cina dari Dinasti Tang (610-907 M) di kompleks candi Ratu Boko, Prambanan, dan Borobudur dapat memberikan keterangan terkait adanya interaksi dagang yang melibatkan kerajaan Mataram kuno dan dinasti Tang (Adhyatman, 1983; Eriawati, 2014). Selain itu relasi Mataram kuno serta Cina juga diperkuat dengan adanya relief perahu bercadik di candi Borobudur yang dimungkinkan sebagai sarana transportasi laut untuk menunjang aktivitas pelayaran perdagangan (Bagus, 2014). Mengacu pada hasil analisis dan komparasi dengan sumber sejarah lain, maka catatan Dinasti Han terkait raja Dewawarman tidak cukup valid. Oleh karenanya sumber asing ini akan sangat meragukan jika digunakan untuk mendukung hipotesis atau klaim sejarah kerajaan Salakanagara.

2. Kritik Terhadap Naskah Wangsakerta Sebagai Sumber Sekunder Sejarah Kerajaan Salakanagara

Keberadaan naskah Wangsakerta ini sebagai rujukan dari kerajaan Salakanagara sebenarnya dikategorikan sebagai sumber sekunder, yakni karya sastra masa kemudian. Namun, yang perlu kita diketahui adalah sejak kapan dan dari mana asal naskah Wangsakerta ini? asal mula naskah Wangsakerta sebagai sumber sejarah Salakanegara di mulai pada tahun 1977 saat kepala museum Sri Baduga, Bandung membeli sebuah naskah melalui perantara Mohammad Asikin yang merupakan warga Cirebon.

Wildhan Ichzha Maulana
Polemik Salakanagara: Meninjau Kebenaran Bukti Historis Salakanagara
dalam Pentas Sejarah Kuno di Indonesia

Adapun menurut keterangan Asikin, naskah kuno yang ditawarkannya berasal dari berbagai daerah di Indonesia seperti Kalimantan Selatan, Banten, Cirebon, Jambi, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Sumatra Barat, Kalimantan Timur, hingga Bali (Ekadjati, 2017a; Hardani, 2010). Masih menurut keterangan dari Asikin, bahwa naskah-naskah kuno tersebut di bawa ke luar Cirebon, karena khawatir akan jatuh ke pemerintah kolonial Belanda saat masa penjajahan (Nina H. Lubis, 2002). Sekitar awal tahun 1980-an terdapat beberapa jilid salinan dari naskah kuno yang selanjutnya dinamakan sebagai naskah Wangsakerta. Dalam perkembangannya karya sastra ini, kemudian ditulis kembali dan diterbitkan terbatas pada bentuk pengantar, ringkasan isi, suntingan teks, alih aksara, serta terjemahan teks dari bahasa Jawa ke Indonesia (Nina H. Lubis, 2002)

Lebih lanjut di dalam naskah Wangsakerta dijelaskan bahwa karya sastra ini ditulis oleh suatu tim gabungan dari delegasi seluruh wilayah di Nusantara yang masing-masing mengirimkan sekitar 70 orang di bawah pimpinan Pangeran Wangsakerta putra dari Panembahan Girilaya (1650-1662), di mana durasi penulisannya memakan waktu 21 tahun dari tahun 1677 hingga 1698 (Hardani, 2010; Kielstra, 1917). Mengenai aksara serta bahasa Jawa yang digunakan dalam naskah Wangsakerta masih tergolong tipe pesisiran yang berkaitan erat dengan kosakata bahasa Jawa Kuno (Nina H. Lubis, 2002). Adapun isi dari naskah Wangsakerta menceritakan sejarah peradaban di kepulauan Nusantara, khususnya Jawa serta Sunda sejak abad ke-1 M hingga abad ke-17 M. Pembahasan sejarah peradaban Jawa dan Sunda dalam naskah Wangsakerta ini juga dilengkapi dengan ulasan terkait nama kerajaan, para rajanya yang pernah berkuasa, serta durasi waktu pemerintahannya. Selain itu penulisan naskah Wangsakerta terbagi dalam 5 jilid, yakni (1) *Parahyangan*; (2) *Pustaka Dwipantaraparwa*; (3) *Negarakertabhumi*; (4) *Pusaka Pararatwan I Bhumi Yawadwipa*; serta (5) *Pustaka Rajya-Rajya I Bhumi Nusantara* (Ekadjati, 2017b; Nina H. Lubis, 2002)

- a. Umur naskah yang tidak sesuai, di mana naskah Wangsakerta ini ditulis pada abad ke-17 M menggunakan aksara serta bahasa Jawa kuno. Namun, menurut pandangan ahli epigrafi, Boechari yang mewakili Hasan Muarif Ambary, R.P. Soeyono, Haryati Subadio, serta Budi Santoso menyatakan naskah Wangsakerta sebenarnya ditulis pada kertas jenis manila yang dicelup, kemudian terkesan dituakan usianya (Boechari, 1988; Nina H. Lubis, 2002). Adapun M.C. Ricklefs yang sepakat dengan pendapat Boechari juga turut meragukan keaslian naskah Wangsakerta ini, di mana menurutnya

naskah tersebut tidak ditulis pada abad ke-17 seperti keterangan tahun aslinya, karena tulisan Jawa kunonya yang terkesan masih kasar. Di sisi lain pada masa peradaban Islam di Jawa saat itu telah menggunakan bahasa Jawa baru, maka agak aneh jika penulisan naskah Wangsakerta justru menggunakan bahasa Jawa kuno yang notabene sudah mulai pudar sejak masa akhir kekuasaan kerajaan Majapahit (Widayat & Suwardi, 2005; Zoetmulder, 1994).

- b. Berdasarkan keterangan dari Arsip Nasional Republik Indonesia yang melaksanakan pengujian bahan kertas naskah Wangsakerta justru menyebutkan bahwa usia kertas yang digunakan ternyata berada di kisaran 100-200 tahun (Nina H. Lubis, 2002)
- c. Keberadaan tim atau panitia penyusun naskah Wangsakerta dinilai meragukan, di mana dalam naskah telah tersebut dijelaskan bahwa penyusunnya berasal dari delegasi seluruh penjuru Nusantara yang masing-masing terdiri dari 70 orang (Nina H. Lubis, 2002)
- d. Isi naskah Wangsakerta yang dinilai terlalu rinci, di mana naskah Wangsakerta mampu mengurai sejarah masa praaksara, kerajaan klasik, bahkan hingga abad ke-17 khususnya di wilayah Jawa serta Sunda dengan cukup detail, sehingga melebihi karya-karya seperti babad, kidung, dan hikayat yang sezaman (Hardani, 2010). Bahkan yang mengejutkan jika dibandingkan dengan Babad Tanah Jawi yang usianya 45 tahun lebih awal juga tidak mampu menguraikan beragam peristiwa sejarah selengkap naskah Wangsakerta. Selain itu dalam naskah Wangsakerta juga terdapat istilah Jawa Kulwan (Jawa Barat), Jawa Madya (Jawa Tengah), dan Jawa Wetan (Jawa Timur), di mana istilah ini sebenarnya merujuk pada pembagian wilayah administratif yang marak digunakan pada penulisan buku sejarah modern dan belum digunakan pada penulisan naskah kuno (termasuk Wangsakerta) pada abad ke-17 M (Nina H. Lubis, 2002). Lebih lanjut dalam naskah Wangsakerta juga disebutkan bahwa Salakanagara mempunyai ikatan keluarga dengan Kutai kuno serta Tarumanegara yang ditandai dengan 2 poin penting, yakni (1) putra Dewawarman yang bernama Aswawarman pergi ke pulau Kalimantan dan dijadikan menantu oleh tokoh lokal yang bernama Kudungga, di mana kelak putranya menjadi raja terkemuka Kutai kuno yang melaksanakan kenduri dengan persembahan 20.000 sapi kepada kaum brahmana. (2) Purnawarman merupakan cucu dari Jayasingawarman menantu Dewawarman VIII yang mendirikan Tarumanegara sebagai penerus Salakanagara. Akan tetapi, 2 poin

keterangan dalam naskah Wangsakerta yang notabene merupakan sumber sekunder justru terbantahkan melalui keterangan prasasti yang ada sebagai sumber primer, yakni (1) telah dijelaskan dalam prasasti Yupa Aswawarman adalah putra kandung dari Kudungga dan ayah dari Mulawarman raja terkenal Kutai kuno. (2) Dijelaskan dalam 7 prasasti (Ciaruteun, Kebonkopi, Pasir Koleangkak, Pasir Awi, Muara Cianten, Tugu, dan Cidanghiang) bahwa penguasa Tarumanegara adalah Purnawarman, sedangkan leluhur maupun penerusnya tidak disebutkan dalam keterangan prasasti tersebut (Tim Penulisan Sejarah Indonesia, 2010).

- e. Naskah Wangsakerta dinilai memiliki corak yang identik dengan pemikiran sejarah para sarjana Belanda seperti C.C Berg dan N.J. Krom (Hardani, 2010). Dalam hal ini misalnya menurut perspektif ahli epigraf Boechari naskah Wangsakerta menyebut bahwa istri raja Airlangga bernama Sanggramawijaya berasal dari Sriwijaya, namun klaim ini sebenarnya adalah kesalahan tafsir dari C.C Berg tahun 1939. Belakangan Boechari telah berhasil mematahkan klaim sejarah tersebut dengan mengidentifikasi tokoh Sanggramawijaya sebagai putri dari raja Airlangga. Hal ini juga dianggap relevan dengan tradisi orang Jawa yang menyamakan Sanggramawijaya dengan Dewi Kilisuci (Tim Penulisan Sejarah Indonesia, 2010; Yatmin & Siswanto, 2017).

3. Pandangan Masyarakat Banten Atas Eksistensi Kerajaan Salakanagara

Manusia memiliki naluri serta kecenderungan untuk menjaga dan melestarikan kisah sejarah kepada generasi berikutnya. Mengenai upaya pelestarian kisah sejarah tersebut sebenarnya tidak bisa lepas dari aspek *tangible* (berwujud) dan *intangible* (tidak berwujud) yang dilakukan melalui beragam metode, baik secara lisan, catatan tertulis, tinggalan benda-benda sejarah, tradisi, pemikiran, atau dalam bentuk dokumentasi lain. Sebagian besar orang menilai bahwa sejarah merupakan pedoman, refleksi, serta acuan bagi kehidupan hari ini dan masa depan. Adapun dalam kaitannya dengan eksistensi kerajaan Salakanagara, maka juga tidak terlepas dari pelestarian sejarahnya melalui catatan tertulis, tinggalan benda sejarah, tradisi adat, dan pemikiran yang mengakar kuat pada masyarakat Banten. Mengacu pada fakta saat ini memang terdapat dualisme pandangan yang muncul di masyarakat Banten atau bahkan masyarakat Indonesia secara umum mengenai kebenaran dari eksistensi kerajaan Salakanagara.

Sebagaimana telah disinggung pada sub pembahasan sebelumnya bahwa dalam kajian historis-archeologis eksistensi kerajaan Salakanagara sangat diragukan atau bahkan dianggap tidak pernah ada, karena tidak didukung dengan ketersediaan sumber primer yang kuat bahkan sumber sekundernya, yakni naskah Wangsakerta juga dinilai kontroversial. Akan tetapi, dalam menyikapi kebenaran ilmiah dan fakta sosial-historis yang ada masyarakat dengan kesadaran sejarah yang ilmiah akan cenderung membenarkan klaim bahwa eksistensi Salakanagara memang meragukan sesuai dengan analisis penelitian para ahli yang telah dipublikasi secara luas. Di sisi lain mayoritas masyarakat terutama dari lingkup budayawan dan komunitas pegiat sejarah masih membenarkan klaim sejarah bahwa keberadaan Salakanagara memang ada, sebab adanya pengaruh sejumlah aspek sebagai berikut.

- a. Adanya tradisi ritual mandi kolam keramat di situs Cihunjuran yang telah mengakar kuat. Pada dasarnya kebudayaan Sunda lekat dengan penghormatan atas unsur air dan bagi masyarakat Sunda air menjadi simbol kehidupan yang fundamental, sehingga seluruh sumber mata air baik di tempat terbuka atau yang berada di sebuah situs purbakala selalu dikunjungi serta ditetapkan sebagai tempat yang dikeramatkan (Binangkit, 2021; Latifundia, 2016; Munandar, 2011). Dalam konteks ini kolam dan mata air yang berada di situs Cihunjuran dikeramatkan oleh masyarakat, karena juga dianggap sebagai petilasan Aki Tirem yang merupakan leluhur serta mertua raja Dewawarman pendiri kerajaan Salakanagara (Binangkit, 2021). Lebih lanjut dapat dipahami bahwa pandangan kesejarahan tentunya tidak terlepas dari peranan masyarakat pendukungnya, di mana dalam kurun waktu yang lama mereka berhasil mengintegrasikan unsur sejarah dan kebudayaan sebagai sarana pewarisan nilai adat. Hal demikian merupakan langkah brilian sebagai strategi untuk melestarikan sejarah, namun juga harus diakui menjadi faktor yang menyebabkan kaburnya cara pandang sejarah, di mana akhirnya kebenaran ilmiah sejarah dikesampingkan untuk mengakomodasi kebenaran sejarah dari sisi sosio-kulturalnya.
- b. Pemahaman mayoritas masyarakat seputar sejarah Banten pada era kerajaan Salakanagara cenderung terbatas (Perdana, 2020). Sebab literatur dan latar belakang budaya dipengaruhi masa lampau yang dikembangkan dalam cerita sejarah telah membentuk perspektif masyarakat dalam memahami, menghargai, ataupun melestarikan kisah sejarah.

Wildhan Ichzha Maulana
Polemik Salakanagara: Meninjau Kebenaran Bukti Historis Salakanagara
dalam Pentas Sejarah Kuno di Indonesia

Apabila mengacu pada ulasan sebelumnya dapat dipahami bahwa masyarakat Banten mayoritas memang menyakini bahwa Salakanagara pernah berdiri di wilayah Banten berdasarkan dugaan bukti arkeologis, yakni (1) situs Cihunjuran dan arca Ganesha yang terletak di Kabupaten Pandeglang. (2) Situs Lebak Kosala dan Lebak Cibedug yang terletak di Kabupaten Lebak. Beberapa tinggalan arkeologis tersebut, kemudian juga dilegitimasi dengan paparan sejarah lengkap Salakanagara dalam naskah Wangsakerta yang didukung sumber asing mencakup buku "*Geographike Hyphegesis*" karya Cladius Ptolomeus serta catatan Dinasti Han tahun 132 M. Adanya berbagai sumber sejarah tersebut dan masih lestari tradisinya-tradisi lokal yang berhubungan erat dengan sejumlah situs Salakanagara hingga saat ini turut membentuk keyakinan, paradigma, serta orientasi historis sebagian besar masyarakat Banten yang membenarkan eksistensi kerajaan Salakanagara tersebut. Lebih lanjut dalam menyikapi realitas sosial ini yang perlu ditekankan adalah, meskipun kebenaran kerajaan Salakanagara tidak didukung sumber sejarah yang valid dan tidak diakui keabsahannya dalam lingkup akademik, setidaknya masyarakat Banten tetap menghargai sejarah Salakanagara sebagai wujud identitas lokalnya. Sedangkan dalam lingkup akademik kajian seputar Salakanegara masih terbatas pada hipotesa sejarah. Namun, juga tidak menutup kemungkinan jika di waktu mendatang ditemukan bukti sejarah yang benar-benar valid, maka keberadaan Salakanegara dapat lebih diperjelas.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa eksistensi dari kerajaan Salakanagara sebenarnya hanya didukung sumber sekunder, yakni naskah Wangsakerta bagian "*Pustaka Rajya-Rajya I Bhumi Nusantara*" yang masih kontroversi. Adapun mengenai keberadaan sejumlah tinggalan arkeologis (situs Cihunjuran, Lebak Kosala, hingga Lebak Cibedug) yang diduga sebagai sumber primer justru lebih bercorak austronesia, sehingga tidak sejalan dengan argumen dalam naskah Wangsakerta yang menyebutkan bahwa Salakanagara merupakan kerajaan Hindu. Bukti arkeologis lainnya seperti temuan arca ganesha justru menunjukkan corak kebudayaan hindu trimurti yang berusia lebih muda dari abad ke-8 hingga 10 M, di mana hal ini juga terpaut jauh dari Salakanagara yang berdiri abad ke-1 M. Adanya catatan asing seperti buku "*Geographike Hyphegesis*" yang menyebut wilayah *argyre chora* (kota perak) memang mempunyai arti yang sama dengan Salakanagara, namun tidak disebutkan secara detail lokasi ataupun ciri-cirinya sehingga kebenarannya juga masih sangat relatif. Berikutnya catatan dari Dinasti Han tahun 132 M juga masih meragukan bahkan Groenveldt dalam

bukunya *“Nusantara Dalam Cacatan Tionghoa”* sama sekali tidak menyebutkan adanya cacatan asing ini, sehingga tidak cukup kuat untuk mendukung klaim sejarah kerajaan Salakanagara.

Mengenai naskah Wangsakerta pada bagian *“Pustaka Rajya-Rajya I Bhumi Nusantara”* sebagai sumber sekunder yang digunakan guna mengklaim sejarah Salakanagara sebagai entitas kerajaan Hindu tertua di wilayah Nusantara juga dipertanyakan. Hal ini tidak lepas dari hasil kritik internal dan eksternal yang menunjukkan bahwa (1) naskah Wangsakerta umur kepenulisannya tidak sesuai di mana penulisan naskah disebutkan pada abad ke-17, namun faktor tulisannya yang kasar mengindikasikan bahwa naskah ini adalah bentuk salinan dan bahan kertasnya juga terkesan dituakan. (2) Keterangan terkait panitia Wangsakerta sebagai penulis naskah tidak jelas dan bisa jadi tidak pernah ada, sebab tidak ada cacatan pendukung yang menjelaskan tentang eksistensi panitia tersebut. (3) Isi naskah Wangsakerta tidak lazim, sebab dinilai terlalu rinci yang melampaui karya sastra lainnya yang sezaman dan pada beberapa bagian yang menjelaskan tentang sejarah kerajaan Kutai kuno serta Tarumanegara tidak sejalan dengan bukti primer yang ada. (4) Naskah Wangsakerta terindikasi menggunakan teori dan pemikiran sarjana Belanda dalam kepenulisannya.

Lebih lanjut terdapat dualisme pandangan masyarakat Banten terhadap eksistensi kerajaan Salakanagara. Dalam hal ini sebagian masyarakat dengan pemahaman kesejarahan yang ilmiah akan meyakini serta membenarkan klaim bahwa eksistensi Salakanagara masih meragukan dengan meninjau kesesuaian dan tersedianya bukti sejarah valid hingga hasil interpretasi sejarah oleh para ahli. Namun, mayoritas masyarakat masih membenarkan klaim sejarah bahwa kerajaan Salakanagara ada, namun hal ini juga perlu dimaklumi dikarenakan minimnya akses literatur dan faktor integrasi kuat antara unsur sosio-kultural-historis dalam membangun cara pandang, pemahaman, maupun penghargaan mereka terhadap kebenaran sejarah yang ada.

Daftar Rujukan

- Abbas, I. (2016). Ketika Sejarah Digugat? (Mengapa Sering Terjadi Kontroversi Dalam Sejarah). *Jurnal Penelitian Humano*, 7(2).
- Abdurrahman, D. (2011). *Metode Penelitian Sejarah*. Logos Wacana Ilmu.
- Adham, D. (1981). *Terjemah Kitab Salasilah Kutai*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Adhyatman, S. (1983). *Notes on Early Olive Green Wares Found in Indonesia*. Himpunan Keramik Indonesia.

Wildhan Ichzha Maulana
Polemik Salakanagara: Meninjau Kebenaran Bukti Historis Salakanagara
dalam Pentas Sejarah Kuno di Indonesia

- Ahmad, T. A. (2007). Yang Kontemporer Yang Kontroversial. *Majalah Sapiens*.
- Ahmad, T. A. (2016). *Sejarah Kontroversial di Indonesia Perspektif Pendidikan*. Pustaka Obor.
- Aizid, R. (2014). *Menguak Kontroversi-Kontroversi Sejarah Indonesia*. Saufa.
- Ali, M. (2007). *Mantan Kiai NU Menggugat Tahlilan, Istighosahan, dan Ziarah Para Wali*. Laa Tasyuk.
- Ali, M., Permana, R., & Supriyatna. (2018). *Sejarah Kota Tangerang Dari Masa Nirleka, Masa Kolonial, Orde Lama, hingga Orde Baru*. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang.
- Alnoza, M., & Munandar, A. A. (2021). Upaya Pemberian Makna Pada Prasasti Berbentuk Stambha Dari Jawa Tengah (Abad IX-X Masehi). *Paradigma: Jurnal Kajian Budaya*, 11(1).
- Arrazaq, N. R., & Rochmat, S. (2020). Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Kerajaan Mataram Kuno Abad IX-X M: Kajian Berdasarkan Prasasti dan Relief. *Jurnal Patrawidya*, 21(2).
- Ashadi. (2017). *Kontroversi Walisongo Tanggapan Kritis Atas Tulisan Mangaradja Onggang Parlindungan: Tuanku Rao Melalui Bukti-Bukti Arsitektural*. Penerbit Arsitektur UMJ Press.
- Ayatrohaedi. (1997). Banten Sebelum Islam. In *Banten Kota Pelabuhan Jalan Sutra Kumpulan Makalah Diskusi*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Ayatrohaedi, & Atja. (1991). *Pustaka Rajya-Rajya I Bhumi Nusantara Suntingan Naskah dan Terjemahannya*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Azra, A. (2002). *Jaringan Global dan Lokal Islam Nusantara*. Mizan.
- Azra, A. (2013). *Jaringan Ulama Timur Tengah & Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII Akar Pembaruan Islam di Indonesia*. Prenada Media Group.
- Bagus, A. A. G. (2014). Keramik Situs So Langgodu, Dompu: Indikasi Pemukiman Masa Lalu. *Forum Arkeologi*, 27(2).
- Barikli, A. (2012). *Konsep Habis Gelap Terbitlah Terang Menurut Islam (Refleksi Pendidikan Bagi Kaum Perempuan)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Binangkit, L. I. (2021). *Ritual Mandi di Kolam Keramat Cihunjuran Desa Cikoneng, Pandeglang, Banten (Studi Tradisi dan Pengaruhnya Bagi Masyarakat)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

- Boechari. (1988). *Kumpulan Makalah Panel Diskusi Naskah Sumber Sejarah Kerajaan Tarumanegara*.
- Boedihartono, Sutarto, A., Triguna, Y., & Indriyanto. (2007). *Sejarah Kebudayaan Indonesia*. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.
- Cahyono, D., & Gunadi. (2007). *Kajian Arkeologi Sejarah Kerajaan Kutai Martapura*. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Conceicao Do, C. D. (2014). *Kepentingan Australia Dalam Mendukung Kemerdekaan Timor Leste*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Dake, A. C. A. (2006). *Berkas-Berkas Sukarno 1965-1967: Kronologi Suatu Keruntuhan* (Syamsulrizal, Ed.). Aksara Karunia.
- Dascal, M., & Chang, H. (2007). *Traditions of Controversy*. John Benjamins Publishing Company.
- David, M. (2018). The Correspondence Theory of Truth. In *The Oxford Handbook of Truth*. Oxford University Press.
- Djarot, E. (2007). *Misteri Supersemar*. Mediakita.
- Ekadjati, E. S. (2004). *Sejarah Kabupaten Tangerang*. Pemerintah Kabupaten Tangerang.
- Ekadjati, E. S. (2017a). *Polemik Naskah Pangeran Wangsakerta*. Dunia Pustaka Jaya.
- Ekadjati, E. S. (2017b). Sekitar Naskah Pangeran Wangsakerta. In *Polemik Naskah Wangsakerta*. Pustaka Jaya.
- Eriawati, Y. (2014). Keramik Cina Dinasti Tang Abad IX Masehi Dari Situs Liangan, Temanggung, Jawa Tengah. In *Liangan Mozaik Perdaban Mataram Kuno di Lereng Sindoro*. Kepel Press.
- Fadhlan, M., & Intan, S. (2002). Geologi Situs Kosala, Kabupaten Lebak, Provinsi Jawa Barat. *Kalpataru: Majalah Arkeologi*.
- Fajar, S. (2017). *Tangan-Tangan Barat di Timor Timur: Keterlibatan Portugal, Australia, dan Amerika Serikat Dalam Masalah Timor Timur Dari Indonesia Tahun 1976-1999*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Firza. (2017). *The Important Role of Local Wisdom in Chacter Education*.
- Gottschalk, L. (2008). *Mengerti Sejarah*. UI Press.
- Groeneveldt, W. P. (2018). *Nusantara Dalam Catatan Tionghoa*. Komunitas Bambu.

Wildhan Ichzha Maulana
Polemik Salakanagara: Meninjau Kebenaran Bukti Historis Salakanagara
dalam Pentas Sejarah Kuno di Indonesia

- Gungwu, W. (2007). The Nanhai Trade: A Study of the Early History of Chinese Trade in the South China Sea. *Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society*, 31(2).
- Guy, J. (2001). The Belitung (Tang) Cargo and Early Asian Ceramic Trade. *Transactions of the Oriental Ceramic Society*, 66.
- Hardani, K. (2010). Rajya-Rajya Ing Jawa Madhya, Raja-Raja Mataram Kuno Abad 9-10 Masehi: Perbandingan Antara Naskah Pustaka Rajya-Rajya I Bhumi Nusantara dengan Prasasti Wanua Tengah III. *JBA: Jurnal Berkala Arkeologi*, 30(1).
- Hartatik, E. S. (2016). Perkembangan Jalan Raya di Pantai Utara Jawa Tengah Sejak Mataram Islam Hingga Pemerintahan Daendels. *Paramita: Historical Studies Journal*, 26(2).
- Hartono, Y., & Huda, K. (2020). *Sejarah Kontroversial G-30-S/PKI: Kontruksi Materi dan Praksis Pembelajaran*. UNIPMA Press.
- Herawati, Y. (2019). Cerita Rakyat "Aji Batara Agung Dewa Sakti" dan "Putri Karang Melenu" Dari Kutai Kartanegara (Kajian Motif Indeks Thompson). *Jentera: Jurnal Kajian Sastra*, 8(1).
- Husda, H. (2019). Rekonstruksi Sejarah Kebangkitan Nasional. *Jurnal Adabiya*, 21(2).
- Hutagalung, B. R. (2010). *Serangan Umum 1 Maret 1949*. LKiS.
- Indarti, N. (2020). Hakikat Ilmu Pengetahuan dan Relasinya dengan Teori Kebenaran Dalam Perspektif Tafaqquh fi Ad Diin. *Jurnal Al Makrifat*, 5(1).
- Kartodirdjo, S. (2017). *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Penelitian Sejarah*. Ombak.
- Kielstra, E. B. (1917). De Sultans van Cheribon. In *De Indische Archipel*. De Erven F. Bohr.
- Kochhar, S. K. (2008). *Teaching of History* (A. Nusantara, Ed.). Gramedia Widia Sarana.
- Korom, P. (2015). Elites: History of the Concept. In J. D. Wright (Ed.), *The International Encyclopedia of Social and Behavioral Sciences*. Elsevier.
- Krom, M. N. (1931). *Hindoe Javanansche Geschiedenis*. W. van Hoeve.
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Bentang Pustaka.

- Kusuma, T. A. B. N. S., & Damai, A. H. (2019). Perkembangan Kebudayaan Austronesia di Kawasan Asia Tenggara dan Sekitarnya. *Naditira Widya*, 13(2).
- Latifundia, E. (2016). Mengeramatkan Sumber Air Dalam Masyarakat Kuningan: Religi Masa Lalu Hingga Kini. *Purbawidya: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Arkeologi*, 5(1).
- Lubis, N. H. (2002). Kontroversi Tentang Naskah Wangsakerta. *Humaniora*, 14.
- Lubis, N. H., Ali, M., Saringendyanti, E., Falah, M., & Suwardi, B. (2014). *Sejarah Banten Membangun Tradisi dan Peradaban*. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten.
- Mahendra, A., Dzakiruddin, M., & Rusadi, E. Y. (2022). Kemerdekaan Timor Portugis Sebagai The New World Order Portugal. *Al Ma'arief: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya*, 4(1).
- Marihandono, D. (2008). *Medekonstruksi Mitos Pembangunan Jalan Raya Cadas Pangeran 1808: Komparasi Sejarah dan Tradisi Lisan*.
- Maulana, R. (1997). *Ikonografi Hindu*. Universitas Indonesia.
- Maulana, W. I. (2022). *Konsep Moderasi Beragama Walisongo: Telaah Atas Buku Atlas Walisongo Karya Agus Sunyoto*. Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Maziyah, S. (2016). Fungsi Kain Impor di Jawa Pada Abad 9-15 Berdasar Sumber Arkeologis. *International Conference Southeast Asia Maritime World*.
- Muhammad, A. M. (2017). *Sejarah Agama Buddha: Penyebaran Buddhisme di Kepulauan Nusantara (Abad ke 2-10 M)*. Universitas Negeri Jakarta.
- Muhammad, A. N. S., & Pamungkas, Y. H. (2016). Kajian Arsitektur dan Fungsi Candi Kendalisada di Situs Gunung Penanggungan. *Avatara: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 4(3).
- Munandar, A. A. (2011). *Bangunan Suci Sunda Kuna*. Wedatama Widya Sastra.
- Munandar, A. A. (2012). Kerajaan Salakanegara Berdasarkan Data yang Tersedia. *Al Tsaqafa : Jurnal Ilmiah Peradaban Islam*, 10(1).
- Munandar, A. A. (2019). *Kalpalata: Data dan Interpretasi Arkeologi*. Wedatama Widya Sastra.
- Murdiastomo, A. (2020). Penggambaran Ornamen Ular Pada Arca Ganesha Koleksi Museum Candi Prambanan, Yogyakarta. *Berkala Arkeologi*, 40(1).

Wildhan Ichzha Maulana
Polemik Salakanagara: Meninjau Kebenaran Bukti Historis Salakanagara
dalam Pentas Sejarah Kuno di Indonesia

- Nordholt, H. S., Purwanto, B., & Saptari, R. (2008). *Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia- KITLV.
- Nurmiainen, J. (2006). Northern European Elites In Historical Perspectives. *Scandinavian Journal of History*, 30(3-4).
- O'Connor, D. J. (2021). *The Correspondence Theory of Truth*. Routledge.
- Pambudi, A. (2006). *Supersemar Palsu: Kesaksian Tiga Jenderal*. Medi Pressindo.
- Perdana, N. G. (2020). Mendobrak Dominasi Sejarah: Upaya Laboratorium Banten Girang (LBG) Dalam Mengembalikan Kembali Sejarah Pra Islam dan Tinggalannya di Banten. *Umbara: Indonesian Journal of Anthropology*, 5(2).
- Poerbatjaraka. (1957). *Kepustakaan Jawa*. Djambatan.
- Pradipta, M., & Herwindo, R. P. (2017). Ciri Budaya Megalitik Pada Arsitektur Candi di Pulau Jawa (Dari Masa Klasik Tua, Klasik Tengah, dan Klasik Muda). *Jurnal RISA (Riset Arsitektur)*, 1(3).
- Pranoto, S. W. (2010). *Teori & Metodologi Sejarah*. Graha Ilmu.
- Prasetyo, B. (2006). Austronesian Prehistory From the Perspective of Comparative Megalithic. In *Austronesian Diaspora and the Ethnogeneses of People in Indonesian Archipelago*. LIPI Press.
- Purwanto, B. (2004). *Sejarawan Akademik dan Disorientasi Historiografi: Sebuah Otokritik*. Universitas Gadjah Mada.
- Purwanto, B. (2009). Sejarah, Kurikulum dan Pembelajaran Kontroversial: Sebuah Catatan Diskusi. *Seminar Nasional Pembelajaran Sejarah Kontroversial: Problem Dan Solusi*.
- Rahmawati, & Andika, H. (2021). Keagungan Raja Purnawarman Dalam Legenda Kerajaan Tarumanegara di Kampung Muara. *Riksa Bahasa XV*.
- Ricklefs, M. C. (2008). *A History of Modern Indonesia Since c. 1200 (4th Editio)*. Macmillan.
- Said, N. (2014). Politik Etis Kepahlawanan RA Kartini: Menguak Spiritualisme Kartini yang Digelapkan. *Palastren: Jurnal Studi Gender*, 7(2).
- Said, S. H. (2018). *Gestapu 65 : PKI, Aidit, Sukarno, dan Soeharto*. Mizan.
- Saimima, J. R. (2014). Membumikan Sejarah Sosial. *Jurnal Seuneubok Lada*, 1(1).
- Sari, A. P., Arifin, S., & Rijal, S. (2017). Analisis Cerita Rakyat Kutai Aji Batara Agung Dewa Sakti Ditinjau Dari Fungsi Aspek Mitos Dalam Masyarakatnya. *Jurnal Ilmu Budaya*, 1(4).

- Sarip, M. (2020). Kajian Etimologis Kerajaan (Kutai) Martapura di Muara Kauman, Kalimantan Timur. *Yupa: Historical Studies Journal*, 4(2).
- Sedyawati, E. (1994). *Pengarwaan Gaṇeśa Masa Kaḍiri dan Siṅhasāri: Sebuah Tinjauan Sejarah Kesenian*. LIPI.
- Septianingsih, S., Joebagio, H., & S., S. (2014). Model Pembelajaran Sejarah Berbasis Isu-Isu Kontroversial Untuk Meningkatkan Berpikir Historis Mahasiswa (Studi Pada Mahasiswa Sejarah Universitas Muhammadiyah Purwokerto). *Journal of History Education Research*, 15(2).
- Sulasman. (2014). *Metodologi Penelitian Sejarah*. Pustaka Setia.
- Sunyoto, A. (2011). *Walisongo: Rekonstruksi Sejarah yang Disingkirkan*. Transpustaka.
- Sunyoto, A. (2017). *Atlas Walisongo Buku Pertama yang Mengungkap Wali Songo Sebagai Fakta Sejarah*. Pustaka IIMaN.
- Suparno, B. A. (2012). *Reformasi & Jatuhnya Soeharto*. Kompas.
- Syamsuri. (2021). Konstitusi Peralihan Kekuasaan Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martapura (Studi Perpindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia). *Madika: Jurnal Ilmu Politik Dan Governance*, 1(2).
- Tim Lembaga Analisis Informasi (LAI). (2007). *Kontroversi Supersemar: Dalam Transisi Kekuasaan Soekarno-Soeharto*. Media Pressindo.
- Tim Peneliti. (2021). Fasilitasi Lanjutan Kerajaan Kutai Mulawarman Ing Martadipura. *Jurnal Gerbang Etam Balitbangda*, 15(2).
- Tim Penulisan Sejarah Indonesia. (2010). *Sejarah Nasional Indonesia (Zaman Kuno)*. Balai Pustaka.
- Titasari, C. P. (2017). *Latar Belakang Konsep Bangunan Candi Wringinbranjang di Kabupaten Blitar, Jawa Timur*.
- Tobing, L. (2014). *Faktor-Faktor Lepasnya Timor Timur Dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Nkri) Tahun 1999*.
- Toer, P. A. (2005). *Jalan Raya Pos, Jalan Daendels*. Lentera Dipantara.
- Vainker, S. J. (1991). *Chinese Pottery and Porcelain: From Prehistory to the Present*. British Museum Press.
- Wasino, & Hartatik, E. S. (2018). *Metode Penelitian Sejarah Dari Riset Hingga Penulisan*. Magnum Pustaka Utama.

Wildhan Ichzha Maulana
Polemik Salakanagara: Meninjau Kebenaran Bukti Historis Salakanagara
dalam Pentas Sejarah Kuno di Indonesia

Widayat, A., & Suwardi. (2005). *Sejarah Sastra Jawa*. Universitas Negeri Yogyakarta.

Widyastuti, E. (2013). Penguasaan Kerajaan Tarumanegara Terhadap Kawasan Hulu Cisadane. *Purbawidya: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Arkeologi*, 2(2).

Yatmin, & Siswanto, T. B. (2017). Cerita Rakyat Seputar Sri Sanggramawijaya Dharmaprasadottunggadewi (Dewi Kilisuci). *Media Prestasi*, 17(1).

Zoetmulder, P. J. (1994). *Kalangwan: Sastra Jawa kuno Selayang Pandang*. Djambatan.